



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

Pengelolaan Keuangan Masih Amburadul

## Pemkot Gagal Raih Opini WTP

**Ambon** - Pemkot Ambon gagal mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015.

Pemkot memang mengejar opini WTP, namun yang diperoleh justru tetap mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkot tahun anggaran 2015 dilakukan Kepala Sub Auditorial BPK RI Perwakilan Maluku, Rudianto Lumbantobing kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Ketua DPRD James Maatita, di kantor BPK Perwakilan Maluku, Kamis (16/4).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, disimpulkan bahwa Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 adalah WDP. Sebelumnya sejak tahun 2010-2012, BPK tak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemkot atau dikenal dengan sebutan disclaimer. Selanjutnya tahun 2013-2015, pemkot tetap bertahan dengan opini WDP.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Keempat kriteria dimaksud yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Opini yang diberikan oleh pemeriksa itu ada empat jenis yaitu WTP, WDP, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer.

Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sementara opini WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Opini menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Kabarnya, laporan keuangan Pemkot Ambon tahun 2015 diduga tidak memenuhi standar akuntansi pemerintah sehingga BPK tetap memberikan opini WDP sebagaimana yang diterima juga untuk tahun anggaran sebelumnya.

Terkait dengan hal itu, Sekkot Ambon AG Latuheru ketika dikonfirmasi *Siwalima* Kamis (16/6) malam mengaku tak mengetahui secara pasti alasan hingga pemkot hanya mendapat opini WDP padahal semua laporan keuangan di tahun 2015 beserta data pendukungnya sudah diserahkan kepada BPK.

“Kita tidak bisa menjelaskan hasilnya karena semua keputusan untuk menilai laporan keuangan ada di tangan BPK,” kata Latuheru.



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : SIWALIMA**

Dijelaskan, semua laporan yang dimasukan sudah diteliti lebih dulu sesuai prosedur dan standar pengelolaan keuangan.

“Jadi silakan menanyakan langsung kepada BPK karena merekalah yang memberikan penilaian,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemkot Ambon hanya memperoleh opini WDP dari BPK terkait laporan keuangan. **(S-39)**